

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	Metro Jateng

Wilayah Berita : Kabupaten Kendal

Halaman 5

Penyerapan Lambat, DAK Terancam Tak Cair

KENDAL - Dana Alokasi Khusus (DAK) tahap kedua dari Pemerintah pusat terancam tidak bisa dicairkan. Pasalnya sampai saat ini 30 persen DAK sudah ditransfer ke rekening Pemkab Kendal dan yang terserap belum mencapai 75 persen. Padahal batas waktu penyerapan DAK maksimal 21 Juli mendatang.

Namun hal itu sulit dilaksanakan karena banyak faktor, salah satunya karena proses lelang tak lancar. Kalau sampai batas waktu yang diberikan, yaitu 21 Juli mendatang penyerapan DAK tak bisa mencapai 75 persen dari 30 persen dana yang ditransfer sesuai peraturan, DAK tahap dua yang nilainya mencapai puluhan miliar tak akan dicairkan oleh pemerintah pusat. Pemkab Kendal dinilai tidak bisa bekerja menyelesaikan DAK yang sudah diberikan pemerintah pusat pada tahap pertama.

Kalau itu sampai terjadi, masyarakat Kendal yang paling dirugikan. Kalau DAK tahap pertama bisa terserap dengan baik, pembangunan di Kendal akan berjalan maksimal sehingga masyarakat akan menikmati hasil pembangunan itu. Namun kalau DAK tak terserap, bantuan dari pemerintah pusat akan dihentikan, sehingga dana yang seharusnya untuk pembangunan juga akan berkurang. Sebagai dampaknya, Pemkab Kendal harus menanggung biaya pembangunan sendiri tanpa bantuan DAK dari pemerintah pusat.

■ Menyayangkan

Sugiarto Jaya, penyedia jasa konstruksi dari Aspertanas sangat menyayangkan lambatnya penyerapan DAK yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Pasalnya, DAK nilainya sangat besar, atau mencapai puluhan miliar.

Dikatakan, kalau penyerapan dana itu bisa terlaksana sesuai aturan pembangunan di Kendal akan berjalan dengan baik, dan masyarakat akan diuntungkan karena akan banyak pembangunan terutama jalan yang rusak akan menjadi baik. Begitu juga dengan Pemkab Kendal akan mendapat nama baik, karena pembangunan berjalan lancar. "Sebaliknya, kalau DAK tidak terserap sesuai target, maka rakyat yang paling dirugikan, karena pembangunan tersendat dan bantuan puluhan miliar dari pusat tak akan turun," jelasnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah, Tri Marti Andhayani mengatakan, bantuan DAK untuk pemerintah pusat memang nilainya sangat besar, mencapai puluhan miliar. Dikatakan, DAK digunakan untuk pembangunan melalui sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Dinas

Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD dr H Soewondo, DPUPR, DPPKB, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Dinas Perdagangan. Dikatakan, dari sembilan OPD itu bantuan DAK paling banyak untuk pembangunan jalan senilai Rp 24 miliar lebih dan kesehatan sebesar Rp 17 miliar lebih.

Menurut Anti, sapaan akrab Tri Marti Andhayani, sampai saat ini penyerapan DAK memang masih kecil, sehingga pihaknya mengeluarkan surat untuk percepatan penyerapan DAK paling lambat lapornya pada 10 Juli mendatang. Selain itu, pihaknya juga akan konsultasi ke pusat agar waktu penyerapan 75 persen dari 30 persen DAK tahap pertama, yang semula berakhir 22 Juli diundur. "Sejumlah upaya kita lakukan agar target serapan bisa tercapai dan bantuan tahap berikutnya tetap bisa cair," ujarnya. ■ *Mar/SR*